

Judul : Ajak penegak hukum awasi proses PPDB
Tanggal : Minggu, 16 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Ajak Penegak Hukum Awasi Proses PPDB

Kecurangan PPDB juga dilakukan tokoh masyarakat, politikus, dan pejabat demi mendapatkan kursi siswa.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

TERUS berulangnya masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) membuat sejumlah pihak mendesak agar segera dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem penerimaan tersebut.

Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan bahkan menyarankan pelaksanaan PPDB tahun depan melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengawasi prosesnya secara langsung. Dengan langkah itu, praktik kecurangan seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat dihindarkan.

Jika perlu, dibuat pakta integritas yang ditandatangani kepala daerah, kejaksaan, kepolisian, rektor, dan tokoh atau pegiat pendidikan setempat. Lalu pakta integritas itu ditempel di tiap sekolah.

"Itu penting. Pakta integritas ditempel, kalau perlu pakai spanduk besar. Jadi, nanti yang *nitip-nitip*, yang niat mau jalur belakang, malu," kata Cecep ke *Media Indonesia*, kemarin.

Selain itu, selama ini persoalan PPDB disebabkan tidak transparannya sekolah terkait dengan data jumlah rombongan belajar (rombel). Nihilnya transparansi menyebabkan peluang pungutan liar terbuka lebar. Semestinya, kata dia, dinas pendidikan setempat

membuat aturan data rombel tiap sekolah dibuka ke publik secara transparan.

"Sekolah harus bikin sistem *online*. Kalau tidak *online*, masih ada celah untuk berbuat di luar ketentuan. Harusnya rombel dibuka. Setiap kelas 30 murid, misalnya, ya dibuka, angka yang diterima segitu dan tidak boleh berubah," ujar Cecep.

Di tempat terpisah, Ombudsman RI mengungkapkan tahun ini banyak menerima laporan pelanggaran PPDB dari berbagai daerah. Di antaranya mengenai zonasi, perebutan kursi siswa, dan tidak adanya pemerataan mutu lulusan.

Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais menyebut salah satu masalah yang mencuat ialah sistem zonasi. Dengan kemudahan birokrasi dalam pemindahan domisili di aturan tersebut, banyak yang memanfaatkan untuk curang. Ia menyebut contoh di Yogyakarta, dari temuan Ombudsman RI DIY, ada 20 anak terdaftar dengan status famili lain di dalam KK.

Selain itu, Ombudsman mendapat laporan kecurangan yang dilakukan tokoh masyarakat, politikus, dan pejabat guna mendapatkan kursi siswa.

Tak cuma soal zonasi

Namun, kekacauan PPDB tak hanya disebabkan kecurangan terkait dengan zonasi. Menurut Indraza, penyelenggaraan PPDB sudah banyak bermasalah sejak penyiapan aplikasi, aturan

Sejumlah Temuan Ombudsman Terkait Pelanggaran dalam PPDB 2023

- Bermasalah mulai penyiapan aplikasi, aturan teknis pelaksanaan, hingga kesiapan petugas memahami aturan.
- Kecurangan pada proses pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- Kecurangan dalam sistem zonasi akibat kemudahan birokrasi dalam pemindahan domisili.
- Kecurangan yang dilakukan tokoh masyarakat, politikus, dan pejabat untuk mendapatkan kursi siswa.
- Masalah perebutan sekolah karena belum adanya pemerataan jumlah atau kesesuaian rasio anak dan jumlah sekolah dalam satu wilayah.
- Adanya pungutan liar (pungli).
- Jalur penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Penambahan jumlah rombongan belajar.

Kendala Pelaksanaan PPDB 2023

- Aplikasi pendaftaran sering eror.
- Data calon peserta didik baru (CPDB) hilang atau terlempar ke sekolah lain.
- Lambatnya proses verifikasi.



Sumber: Ombudsman RI/Lberg MI

teknis pelaksanaan, hingga kesiapan petugas memahami aturan.

Salah satunya terjadi di Kota Makassar. Pada tahap pertama PPDB, terjadi masalah ketika sejumlah anak yang dinyatakan lulus tiba-tiba keesokan harinya tidak lulus. Rupanya, menurut pengakuan Kadis Pendidikan Sulsel Iqbal Nadjamuddin, ada kesalahan di server. "Terjadi kebocoran saat simulasi pengumuman," akunya, sembari meminta maaf.

Di sisi lain, di sejumlah daerah muncul persoalan lain sebagai imbas PPDB, yaitu sekolah kekurangan murid. Salah satunya di Kabupaten Semarang. Kadis Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang Sukaton Purtono Priyatno mengatakan persoalan kurang

an siswa banyak terjadi di tingkat SD. Dari 451 SD negeri yang ada, 218 di antaranya kekurangan murid karena hanya berisi 2-10 siswa.

"Kekurangan siswa itu pada umumnya terjadi di wilayah perdesaan, sedangkan di kecamatan penuh terisi. Oleh karenanya, akan dilakukan evaluasi dan pembenahan sistem," ujar Sukaton.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengaku tengah mengevaluasi banyaknya praktik kecurangan PPDB. "Evaluasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PPDB saat ini sedang dilakukan," ucap Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto. (Tim Media/X 3)